

Jurnal Komunikasi Pemberdayaan

Kesiapan Masyarakat Dalam Transformasi Menuju Desa Wisata Berbasis *Community-Based Tourism*

Heri Roh Pujiati¹ Ricardho Dhaniel Nugroho²

¹ Universitas Gunung Kidul, Jln. Pontjodirjo, Lingkar Utara, Selang II, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, 55851, Indonesia

² Universitas Gunung Kidul, Jln. Pontjodirjo, Lingkar Utara, Selang II, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, 55851, Indonesia

*Corresponding author: herip5633@gmail.com, dhanielnug@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the readiness of the community of Wotawati Hamlet, Pucung Village, Girisubo Subdistrict, Gunungkidul Regency, in transforming into a Community-Based Tourism (CBT)-based tourist village. This research employs a descriptive qualitative approach to examine community readiness in the transformation process, using interviews, observations, and documentation, which are analyzed through the Miles and Huberman interactive model. The results show that community readiness is progressive but remains at a strengthening stage. This is indicated by the establishment of a tourism village working group supported by organizational bylaws (AD-ART) and management synergy through the Village-Owned Enterprise (BUMKAL), the presence of two certified tour guides, and community participation in training programs related to guiding, homestay management, and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). In addition, economic impacts have begun to emerge since 2023 through collectively managed parking and homestay revenues. Government support through the Village Budget (APBKAL), Regional Financial Assistance (BKK), the Special Fund, and the development of a participatory master plan has further strengthened the transformation process. However, several challenges remain, including limited human resources among tourism actors, the absence of an entrance fee system, limited infrastructure access, and uneven community participation. Overall, community readiness is at an early development stage, with the potential to evolve into inclusive and sustainable CBT-based tourism village governance.

Keywords: *tourist villages; community-based tourism; institutions; participation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan masyarakat Dusun Wotawati, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul dalam transformasi menuju desa wisata berbasis *Community-Based Tourism* (CBT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengkaji kesiapan masyarakat dalam transformasi menuju desa wisata berbasis *Community-Based Tourism* (CBT), melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat bersifat progresif namun masih dalam tahap penguatan, ditandai dengan terbentuknya pokja desa wisata yang didukung AD-ART serta sinergi pengelolaan melalui BUMKAL, keberadaan dua pemandu wisata bersertifikat dan partisipasi masyarakat dalam pelatihan kepemanduan, homestay, dan UMKM, serta mulai munculnya dampak ekonomi sejak 2023 melalui pendapatan parkir dan homestay yang dikelola secara kolektif. Dukungan

pemerintah melalui APBKal, BKK, Dana Keistimewaan, dan penyusunan masterplan partisipatif turut memperkuat proses transformasi, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan SDM pelaku wisata, belum adanya sistem retribusi masuk, keterbatasan akses infrastruktur, dan partisipasi yang belum merata. Secara keseluruhan, kesiapan masyarakat berada pada tahap pengembangan awal dengan potensi menuju tata kelola desa wisata berbasis CBT yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: desa wisata; *community-based tourism*; kelembagaan; partisipasi.

PENDAHULUAN

Kawasan karst merupakan bentang alam yang terbentuk melalui proses pelarutan batuan karbonat seperti batu kapur dan dolomit, sehingga menghasilkan morfologi khas berupa gua, sungai bawah tanah, dolina, ponor, dan tebing curam. Kawasan Karst Gunung Sewu dikenal sebagai salah satu kawasan karst tropis terbesar di Pulau Jawa yang membentang di Kabupaten Gunungkidul (DIY), Wonogiri (Jawa Tengah), dan Pacitan (Jawa Timur). Karakteristik ekologis kawasan karst yang berpori dan miskin air menjadikannya rentan terhadap degradasi lingkungan serta memiliki keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dusun Wotawati, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, merupakan salah satu wilayah yang merepresentasikan dinamika tersebut. Dusun ini terletak di lembah bekas aliran Bengawan Solo purba dan diapit oleh dua perbukitan besar yang menciptakan iklim mikro khas dengan durasi penyinaran matahari relatif lebih singkat. Kondisi geografis tersebut, ditambah dengan akses jalan yang belum sepenuhnya memadai, menjadikan Wotawati relatif terpencil dan menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Secara sosial-ekonomi, mayoritas masyarakat yang berjumlah sekitar 82 kepala keluarga menggantungkan hidup pada sektor agraris, seperti budidaya singkong, jagung, kedelai, pisang, serta peternakan sapi dan kambing. Namun, keterbatasan air, akses pasar, dan minimnya diversifikasi usaha menyebabkan pendapatan masyarakat relatif terbatas. Di sisi lain, potensi bentang alam karst, sejarah geologis Bengawan Solo purba, serta budaya lokal membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

Pengembangan desa wisata dipandang sebagai salah satu strategi pembangunan pedesaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal. Konsep *Community-Based Tourism* (CBT) menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat pariwisata secara adil serta berkelanjutan (Murphy, 1985). Dalam perspektif partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dapat dianalisis melalui model *ladder of citizen participation* yang membagi tahapan partisipasi mulai dari *non-participation* hingga *citizen power* (Arnstein, 1969).

Keberhasilan implementasi CBT sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan masyarakat, yang meliputi pengetahuan dan kesadaran, motivasi dan sikap, kapasitas sumber daya, serta dukungan kelembagaan (Aref, 2011). Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk meningkatkan kesiapan tersebut adalah melalui program *capacity building*, seperti pelatihan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan literasi pemasaran digital (UNWTO, 2018).

Meskipun Dusun Wotawati memiliki potensi alam dan sosial yang signifikan, kesiapan masyarakat dalam mengelola desa wisata belum terpetakan secara komprehensif. Kajian mengenai kesiapan masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya bersifat top-down, tetapi benar-benar berbasis partisipasi dan keberlanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan masyarakat dalam mewujudkan desa wisata berbasis *Community-Based Tourism* (CBT), mengidentifikasi potensi serta tantangan dalam pengembangan pariwisata di Dusun Wotawati, serta menganalisis kontribusi program *capacity building* terhadap peningkatan kesiapan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengkaji kesiapan masyarakat dalam transformasi menuju desa wisata berbasis *Community-Based Tourism* (CBT). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi sosial masyarakat serta dinamika partisipasi yang terjadi di tingkat lokal.

Penelitian dilakukan di Dusun Wotawati, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya potensi wisata yang berkembang serta upaya masyarakat dalam mengarah pada pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan meliputi aparat dusun, perangkat kalurahan, tokoh masyarakat, pengurus Pokdarwis, Pokja Desa Wisata serta warga setempat yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan pariwisata.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai persepsi, kesiapan, serta tantangan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, observasi langsung dilakukan guna memahami kondisi sosial dan aktivitas masyarakat dalam konteks pengembangan wisata. Proses analisis data mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai kesiapan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Karakteristik Masyarakat

Dusun Wotawati terletak di wilayah Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakatnya sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam setempat. Pola kehidupan sosial di dusun ini masih kental dengan nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Tradisi gotong royong tetap terjaga dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembangunan. Hubungan antarwarga yang harmonis mencerminkan kuatnya modal sosial di lingkungan tersebut. Modal sosial ini menjadi aset penting dalam mendukung rencana pengembangan desa wisata. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi sosial yang mendukung transformasi berbasis komunitas.

Secara administratif, Dusun Wotawati ini merupakan bagian dari Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan. Secara geografis, letak absolut dari Kecamatan Ngemplak sendiri berada pada koordinat 8°08'36.0"LS 110°46'58.1"BT. Letak Dusun Pucung ini berjarak 11 Km dari Kecamatan Girisubo dan berjarak 37 Km dari Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul. Dusun Wotawati sendiri memiliki luas wilayah yang mencapai 1,08 Km², atau sekitar 9,98% dari luas seluruh wilayah Kalurahan Pucung. Dusun Wotawati merupakan salah satu dari 10 padukuhan di Kalurahan Pucung, yaitu Padukuhan Pucung (Pusat pemerintahan kalurahan), Padukuhan Wotawati, Padukuhan Wonotoro, Padukuhan Traju, Padukuhan Kandri, Padukuhan Pakel Kopek, Padukuhan Karang Tengah, Padukuhan Nujo, Padukuhan Bengle, Padukuhan Ngreyung. Setiap padukuhan menunjukkan karakteristik geografis yang khas, mengingat lokasinya berada di kawasan karst Pegunungan Seribu. Secara khusus, Padukuhan Wotawati menampilkan keunikan geologis karena terletak di dasar lembah sungai purba yang sangat dalam dan Padukuhan Pucung menjadi pusat pemerintahan di Kalurahan Pucung.

Data demografis di Kalurahan Pucung, struktur kependudukan wilayah ini menunjukkan total populasi sebanyak 3.351 jiwa yang terdistribusi ke dalam 897 Kepala Keluarga (KK), dengan proporsi jenis kelamin yang sedikit didominasi oleh kelompok perempuan yakni sejumlah 1.709 jiwa dibandingkan dengan laki-laki yang berjumlah 1.642 jiwa. Aspek keadaan sosial khususnya pada indikator pencapaian pendidikan, profil sumber daya manusia (SDM) di Kalurahan Pucung

masih terkonsentrasi secara masif pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama, di mana angka tertinggi dipegang oleh tamatan SD/MI yang mencapai 1.306 orang, disusul oleh lulusan SLTP/MTs sebanyak 983 orang, dan kelompok tamatan SLTA/MA sebanyak 802 orang. Meskipun terdapat kelompok minoritas progresif yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi pada jenjang S1/Diploma sebanyak 54 orang, serta tantangan sosial berupa segelintir individu yang terdata putus sekolah sejumlah 15 orang. Dari sisi geografis, dusun ini memiliki potensi alam yang khas seperti bentang alam perbukitan karst dan lingkungan pedesaan yang masih asri. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata berbasis alam dan edukasi. Selain potensi alam, budaya lokal dan aktivitas keseharian masyarakat juga berpeluang menjadi atraksi wisata. Keaslian budaya menjadi nilai tambah dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat. Infrastruktur dasar di dusun ini sudah tersedia meskipun belum sepenuhnya mendukung aktivitas wisata skala besar. Aksesibilitas menuju lokasi relatif dapat dijangkau meskipun memerlukan peningkatan kualitas jalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana.

Dalam aspek ekonomi, sebagian masyarakat mulai melihat peluang usaha dari sektor pariwisata. Beberapa warga menunjukkan minat untuk mengembangkan usaha kuliner dan penyediaan jasa bagi wisatawan. Namun, keterbatasan modal dan keterampilan manajerial menjadi tantangan tersendiri. Pola ekonomi masyarakat yang sebelumnya bertumpu pada pertanian perlu beradaptasi dengan sektor jasa. Transformasi ini memerlukan kesiapan mental dan kemampuan baru. Dukungan dari pemerintah desa dan pihak terkait menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Dengan pendampingan yang tepat, potensi ekonomi lokal dapat berkembang secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kondisi masyarakat Dusun Wotawati menunjukkan adanya peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan desa wisata berbasis CBT. Modal sosial yang kuat menjadi fondasi utama dalam membangun partisipasi masyarakat. Namun, peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih sangat dibutuhkan. Kelembagaan lokal perlu diperkuat agar mampu mengelola potensi wisata secara profesional. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan transformasi. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang serta komitmen bersama. Dengan langkah strategis dan partisipatif, Dusun Wotawati berpotensi berkembang menjadi desa wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Konsep *Community Based Tourism*

Konsep *Community-Based Tourism* (CBT) merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, serta pemanfaatan aktivitas wisata. Pendekatan ini muncul sebagai alternatif terhadap model pariwisata konvensional yang cenderung eksploitatif dan seringkali tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat. Dalam perspektif CBT, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kendali atas sumber daya dan arah pengembangan pariwisata di wilayahnya. Secara teoritis, CBT menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengembangan pariwisata, mulai dari identifikasi potensi, penyusunan rencana, hingga evaluasi program. Partisipasi tersebut bersifat inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh lokal, kelompok perempuan, pemuda, serta pelaku usaha. Hal ini mendorong terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan demokratis, sehingga mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memperkuat rasa memiliki terhadap kegiatan pariwisata.

Di samping itu, CBT juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata diupayakan agar tetap beredar di dalam komunitas melalui pengembangan berbagai usaha lokal, seperti jasa pemandu wisata, homestay, kerajinan, dan kuliner khas daerah. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada pihak luar.

Lebih lanjut, prinsip keberlanjutan menjadi salah satu aspek fundamental dalam CBT, yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan budaya. Pengelolaan pariwisata berbasis komunitas menuntut adanya upaya pelestarian terhadap sumber daya alam dan nilai-nilai budaya lokal sebagai daya tarik utama wisata. Oleh karena itu, CBT mendorong penerapan praktik ramah lingkungan, perlindungan terhadap kearifan lokal, serta upaya mitigasi terhadap dampak negatif pariwisata seperti eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Pada akhirnya, keberhasilan penerapan CBT sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan lokal serta kualitas tata kelola yang mendukung. Diperlukan adanya struktur organisasi yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang sinergis antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan dukungan tersebut, CBT dapat menjadi model pengembangan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan jangka panjang.

Tingkat Kesiapan Masyarakat Dusun Wota-Wati

Masyarakat lokal merupakan aktor kunci dalam proses transformasi suatu kawasan menjadi desa wisata yang berkelanjutan. Transformasi menuju *Community-Based Tourism (CBT)* mensyaratkan tidak hanya potensi sumber daya alam dan budaya, tetapi juga kesiapan sosial dan kelembagaan masyarakat dalam mengambil peran aktif di semua fase pengembangan pariwisata. Kesiapan ini mencakup dimensi partisipasi, keterampilan pengelolaan, kesadaran akan peluang ekonomi, serta kemampuan mengelola konflik sosial dan perubahan nilai budaya yang mungkin muncul melalui interaksi dengan wisatawan eksternal.

Dalam konteks Dusun Wotawati, potensi alam, budaya, serta warisan lokal memberi modal awal yang signifikan untuk pengembangan CBT. Namun kesiapan komunitas tidak bersifat otomatis; perlu adanya komitmen bersama dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan. Penelitian di Lamajang Tourism Village menunjukkan bahwa pada tahap awal pembentukan desa wisata berbasis CBT, *readiness* masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam mengelola atraksi dan sumber daya lokal, serta adanya evaluasi dan strategi peningkatan kapasitas yang sistematis untuk menjadikan produk wisata berkualitas dan berkelanjutan (Andjani, Isabela Fitria et.al. 2025)

Aspek sosial seperti keterlibatan kelompok sadar wisata (*Pokdarwis*), jaringan sosial, dan budaya gotong royong sangat menentukan tingkat kesiapan komunitas. Studi di Desa Wisata Giyanti memperlihatkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan dan pengelolaan atraksi wisata berkontribusi pada munculnya rasa kepemilikan terhadap program CBT, yang kemudian memperkuat daya tawar komunitas dalam pengembangan destinasi (Ammela Maulani, et. al.2025). Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat Dusun Wotawati juga perlu dilihat dari sejauh mana warga mampu memobilisasi sumber daya kolektifnya dalam kegiatan-kegiatan yang produktif dan berkelanjutan.

Kemampuan masyarakat dalam menghadapi dinamika transformasi juga berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian di Desa Wisata Hijau Bilebante menemukan bahwa penerapan konsep CBT dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi kegiatan ekonomi yang melibatkan warga secara langsung. (Kamila, Virjina, et.al. 2025) Dengan demikian, kesiapan masyarakat dalam Wotawati perlu juga diukur dari kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha lokal yang bersinergi dengan aktivitas pariwisata, seperti *homestay*, kuliner lokal, kriya, serta jasa pemandu wisata. Lebih jauh, kesiapan ini juga mencakup dimensi kelembagaan dan tata kelola berbasis masyarakat. Studi di wilayah lain menegaskan pentingnya peran lembaga lokal (*Pokdarwis*, BUMKal dan tokoh adat) dalam memfasilitasi dialog antarwarga, mengelola konflik kepentingan, serta membangun aturan main yang jelas dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dalam konteks Wotawati, pembentukan struktur kelembagaan yang inklusif dan representatif menjadi prasyarat untuk menjamin pemerataan manfaat dan keberlanjutan transformasi CBT.

Kesiapan masyarakat juga dipengaruhi oleh akses terhadap pembelajaran, pelatihan, dan dukungan eksternal seperti pendampingan pemerintah, akademisi, maupun organisasi non-pemerintah. Intervensi ini penting untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam manajemen

destinasi, pemasaran, serta pengukuran dampak sosial-ekonomi. Integrasi antara kesiapan internal komunitas dan dukungan eksternal akan menentukan apakah Dusun Wotawati dapat benar-benar bertransformasi menjadi desa wisata berbasis CBT yang mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Kesiapan Kelembagaan Dan Organisasi i

Kesiapan kelembagaan merupakan fondasi utama dalam implementasi *Community-Based Tourism (CBT)* karena model ini menempatkan masyarakat sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat utama kegiatan pariwisata. Di Dusun Wotawati, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, penguatan kelembagaan telah dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja (*pokja*) yang bertugas mengoordinasikan pengembangan potensi wisata dan usaha ekonomi lokal. Struktur ini berfungsi sebagai wadah partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa wisata, sehingga prinsip tata kelola berbasis komunitas dapat berjalan secara kolektif dan terorganisir.

Selain itu, tata kelola pemerintah Kalurahan Pucung turut berperan penting dalam mendukung kesiapan kelembagaan tersebut. Pemerintah kalurahan melalui perangkat kalurahan dan dukuh berfungsi sebagai fasilitator, regulator, sekaligus mediator dalam proses pengembangan desa wisata. Peran ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata, integrasi program *pokja* ke dalam perencanaan pembangunan desa (seperti RKP Kalurahan), serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sinergi antara kelembagaan lokal (*pokja*) dan tata kelola pemerintahan Kalurahan ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada kepentingan masyarakat setempat.

Pada tahun 2025, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui program kolaboratif *Kosabangsa* yang melibatkan Universitas Gunung Kidul dan Universitas Negeri Yogyakarta. Program ini berorientasi pada penguatan kompetensi teknis dan manajerial masyarakat, khususnya dalam pengolahan limbah ternak, pengembangan produk UMKM, serta strategi pemasaran berbasis digital. Pelatihan pengolahan limbah ternak menjadi intervensi penting karena mayoritas masyarakat memiliki aktivitas peternakan, sehingga pendekatan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan sejalan dengan prinsip *sustainable tourism* dalam CBT.

Dalam aspek pengembangan produk, masyarakat memperoleh pelatihan *branding* dan pengemasan produk unggulan lokal, yaitu *blendrat*, sebagai identitas khas Wotawati. Proses *rebranding* ini mencakup perbaikan desain kemasan, standarisasi produksi, hingga penentuan segmentasi pasar. Pendekatan tersebut memperkuat posisi produk lokal sebagai *value proposition* dalam rantai ekonomi desa wisata. Dengan demikian, produk UMKM tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai representasi budaya dan citra destinasi.

Penguatan kelembagaan juga terlihat melalui integrasi digitalisasi pemasaran. Masyarakat dilatih memanfaatkan media sosial seperti TikTok sebagai sarana promosi wisata dan produk lokal, serta penggunaan *marketplace* untuk distribusi produk secara lebih luas. Transformasi digital ini menunjukkan adanya kesiapan adaptif terhadap perubahan pola konsumsi wisatawan dan perilaku pasar. Digitalisasi tidak hanya memperluas jangkauan pemasaran, tetapi juga meningkatkan daya saing UMKM Wotawati dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis desa.

Selain itu, terdapat 15 rumah produksi UMKM makanan olahan khas Wotawati yang telah aktif beroperasi. Keberadaan rumah produksi ini menjadi indikator konkret kesiapan organisasi ekonomi lokal dalam menopang desa wisata. Melalui pelatihan pengolahan UMKM, masyarakat memperoleh peningkatan kapasitas dalam manajemen produksi, higienitas, pencatatan keuangan sederhana, serta diversifikasi produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan

kelembagaan Wotawati tidak bersifat normatif, melainkan telah terealisasi dalam praktik kolektif yang terstruktur.

Secara keseluruhan, kesiapan kelembagaan dan organisasi di Dusun Wotawati memperlihatkan adanya konsolidasi sosial, peningkatan kapasitas teknis, serta adaptasi terhadap inovasi digital. Kolaborasi antara masyarakat, perguruan tinggi, dan struktur pokja menjadi indikator bahwa transformasi menuju desa wisata berbasis CBT berjalan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis pemberdayaan. Dengan fondasi kelembagaan yang semakin kuat, Wotawati memiliki modal sosial dan institusional yang memadai untuk mengelola pariwisata secara mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesiapan Ekonomi Masyarakat

Kesiapan ekonomi masyarakat merupakan indikator krusial dalam menilai efektivitas transformasi menuju desa wisata berbasis *Community-Based Tourism (CBT)*. Berdasarkan keterangan Bapak Dukuh Wotawati, pada periode 2021–2022 pengembangan desa wisata belum menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga. Tahap tersebut dapat dikategorikan sebagai fase inisiasi dan konsolidasi kelembagaan, di mana fokus masih pada perencanaan, pembangunan infrastruktur awal, serta pembentukan struktur organisasi pengelola. Secara konseptual, kondisi ini sejalan dengan tahapan *destination development* yang menyatakan bahwa manfaat ekonomi langsung pada masyarakat umumnya belum optimal pada fase embrional karena investasi sosial dan fisik masih dominan dibandingkan arus kunjungan wisatawan.

Perubahan mulai terlihat pada tahun 2023, ketika pembangunan desa wisata di Wotawati mulai berjalan lebih konkret dan kunjungan wisatawan meningkat secara bertahap. Pada fase ini, masyarakat memasuki tahap penyesuaian ekonomi, di mana mulai tercipta sumber pendapatan (*income generating activities*) yang bersumber dari aktivitas wisata, seperti retribusi parkir dan penyediaan homestay. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi lokal dari dominasi sektor primer menuju integrasi dengan sektor jasa pariwisata. Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan ekonomi masyarakat tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses adaptasi terhadap peluang pasar dan dinamika kunjungan.

Pendapatan dari sektor parkir dan homestay dikelola secara kolektif melalui mekanisme pembagian hasil yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Distribusi pendapatan dilakukan antara Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan kas kelompok kerja (*pokja*) desa wisata. Skema ini mencerminkan praktik tata kelola ekonomi berbasis komunitas, di mana keuntungan tidak terpusat pada individu tertentu, tetapi dialokasikan untuk kepentingan kelembagaan dan pengembangan destinasi secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, keberadaan AD-ART menjadi instrumen formal yang mengurangi potensi konflik distribusi serta memperjelas hak dan kewajiban setiap aktor dalam sistem pengelolaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian nasional yang dipublikasikan dalam *Jurnal Kepariwisata Indonesia* (2021), yang menjelaskan bahwa pada tahap awal pengembangan desa wisata berbasis CBT, manfaat ekonomi bagi masyarakat cenderung muncul secara bertahap setelah terdapat kepastian sistem pengelolaan dan peningkatan jumlah kunjungan. Studi tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan pendapatan sangat dipengaruhi oleh tata kelola kolektif dan transparansi distribusi keuntungan. Dengan kata lain, struktur kelembagaan yang jelas menjadi prasyarat munculnya dampak ekonomi yang nyata.

Penelitian Pradana et al. (2022) menunjukkan bahwa desa wisata yang menerapkan sistem pembagian hasil melalui lembaga desa (BUMDes/BUMKal) dan kelompok pengelola memiliki tingkat stabilitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan individual. Penelitian tersebut menemukan bahwa model distribusi berbasis kelembagaan mampu meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kondisi ini relevan dengan praktik di Wotawati, di mana pendapatan dari parkir dan *homestay* tidak hanya menjadi sumber ekonomi rumah tangga, tetapi juga menjadi modal sosial untuk pengembangan destinasi.

Lebih lanjut, penelitian Suryanto et al. (2023) menegaskan bahwa pada fase pertumbuhan desa wisata, masyarakat biasanya mengalami periode adaptasi ekonomi yang ditandai dengan fluktuasi pendapatan dan proses pembelajaran kolektif. Namun demikian, ketika sistem organisasi dan regulasi telah mapan, kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan lokal cenderung meningkat secara progresif. Berdasarkan kerangka tersebut, kesiapan ekonomi masyarakat Wotawati dapat dikategorikan berada pada tahap berkembang (*developing stage*), di mana manfaat ekonomi mulai dirasakan sejak 2023, didukung oleh regulasi internal (AD/ART), mekanisme distribusi kolektif, serta integrasi antara BUMKAL dan pokja desa wisata.

Secara keseluruhan, dinamika ekonomi di Dusun Wotawati menunjukkan bahwa kesiapan ekonomi masyarakat dalam transformasi menuju CBT bersifat gradual dan institusional. Dampak ekonomi mulai muncul setelah adanya pembangunan fisik, peningkatan kunjungan, serta kepastian sistem distribusi pendapatan. Dengan penguatan tata kelola yang berlandaskan AD-ART dan pengelolaan kolektif melalui BUMKAL serta pokja, fondasi ekonomi desa wisata Wotawati memiliki potensi untuk tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kesiapan sumber daya manusia merupakan salah satu indikator fundamental dalam pengembangan desa wisata berbasis Community-Based Tourism (CBT), karena kualitas pelayanan dan pengelolaan destinasi sangat bergantung pada kapasitas individu yang terlibat. Secara legalitas, Dusun Wotawati telah memiliki dua individu yang memiliki sertifikasi resmi sebagai pemandu wisata, yaitu Bapak Dukuh Wotawati dan Bapak Carik (Sekretaris Desa) Kalurahan Pucung. Kepemilikan sertifikasi ini menunjukkan bahwa desa telah memiliki SDM yang memenuhi standar kompetensi formal dalam bidang pemanduan wisata. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021), sertifikasi pemandu wisata merupakan instrumen penting untuk memastikan kualitas pelayanan, meningkatkan profesionalitas, serta memberikan jaminan kompetensi kepada wisatawan terhadap layanan yang diberikan oleh pengelola destinasi.

Selain aspek legalitas formal, masyarakat Dusun Wotawati juga telah mengikuti berbagai pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial dalam pengelolaan desa wisata. Pada tahun 2024, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan pelatihan pemandu wisata, pelatihan penataan homestay, pelatihan pelayanan wisata, serta pelatihan pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelatihan ini memberikan pengetahuan praktis terkait teknik interpretasi wisata, standar pelayanan tamu, pengelolaan akomodasi berbasis rumah tinggal, serta pengembangan usaha ekonomi kreatif. Dengan adanya intervensi pelatihan tersebut, masyarakat tidak hanya memiliki kesiapan secara administratif, tetapi juga kesiapan secara teknis dalam mendukung operasional desa wisata.

Dalam perspektif teori pengembangan SDM, kesiapan masyarakat dalam sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang berkelanjutan. Menurut Inskeep (1991), keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya, memberikan pelayanan, dan beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi dan pelatihan merupakan bagian integral dari proses transformasi masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek utama dalam pengelolaan destinasi wisata.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Pariwisata Terapan* (2022) yang menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pemanduan dan pelayanan wisata berkontribusi signifikan terhadap kesiapan masyarakat dalam mengelola desa wisata secara mandiri. Penelitian tersebut menemukan bahwa masyarakat yang telah mengikuti pelatihan cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, dan pemahaman pelayanan wisata yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan (Pradana et al., 2025).

Secara keseluruhan, kesiapan sumber daya manusia di Dusun Wotawati menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari aspek legalitas maupun peningkatan kapasitas teknis. Keberadaan pemandu wisata bersertifikat serta partisipasi masyarakat dalam berbagai pelatihan

yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki fondasi kompetensi yang memadai dalam mendukung transformasi menuju desa wisata berbasis CBT. Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa Dusun Wotawati memiliki kesiapan SDM yang tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tuntutan profesionalitas dalam industri pariwisata berbasis masyarakat.

Dukungan Pemerintah dan Stakeholder

Dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan elemen strategis dalam memperkuat kesiapan desa menuju model *Community-Based Tourism (CBT)*. Berdasarkan keterangan Pokja dan Dukuh Wotawati, Pemerintah Kalurahan memberikan komitmen nyata melalui percepatan agenda pembangunan desa wisata. Pembangunan yang semula ditargetkan selesai pada tahun 2026 kemudian diproyeksikan maju menjadi tahun 2027 sebagai bagian dari penyesuaian perencanaan teknis dan pendanaan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas kebijakan dan keseriusan pemerintah dalam memastikan kesinambungan program pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Secara pembiayaan, pembangunan desa wisata Wotawati didukung melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), serta Dana Keistimewaan. Diversifikasi sumber pendanaan ini memperlihatkan adanya sinergi lintas level pemerintahan dalam mendukung pengembangan destinasi. Dalam perspektif tata kelola pembangunan, integrasi APBKal dan BKK mencerminkan komitmen pemerintah kalurahan dalam mengarusutamakan sektor pariwisata sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal. Sementara itu, Dana Keistimewaan menjadi instrumen penting dalam mendukung pelestarian nilai budaya dan penguatan identitas lokal yang menjadi daya tarik utama desa wisata.

Dukungan kelembagaan dari Dinas Pariwisata juga telah berlangsung sejak tahap awal pengembangan. Pada tahun 2022, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul melaksanakan program uji kelayakan Desa Wisata Wotawati. Proses ini berfungsi sebagai asesmen awal terhadap potensi daya tarik, kesiapan masyarakat, infrastruktur dasar, serta aspek kelembagaan. Hasil uji kelayakan yang menyatakan Wotawati lolos menjadi legitimasi formal bahwa desa tersebut memenuhi standar awal sebagai calon desa wisata. Tahapan ini penting dalam siklus pengembangan destinasi, karena menjadi dasar perumusan strategi lanjutan dan akses terhadap dukungan program pemerintah.

Selanjutnya, Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyusunan *masterplan* pengembangan Desa Wisata Wotawati dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Penyusunan dokumen perencanaan ini tidak dilakukan secara top-down, melainkan menggunakan pendekatan *bottom-up*, di mana aspirasi, kebutuhan, dan potensi lokal diidentifikasi melalui partisipasi warga. Model ini selaras dengan prinsip CBT yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan *masterplan* memperkuat rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap arah pengembangan desa wisata.

Secara keseluruhan, dukungan pemerintah dan stakeholder terhadap Desa Wisata Wotawati dapat dikategorikan komprehensif dan berjenjang, mencakup aspek regulasi, pembiayaan, asesmen kelayakan, hingga perencanaan strategis berbasis partisipasi. Sinergi antara Pemerintah Kalurahan, Dinas Pariwisata Kabupaten, dan Dinas Pariwisata Provinsi menunjukkan bahwa transformasi menuju desa wisata berbasis CBT di Wotawati tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil kolaborasi multipihak dengan model pembangunan partisipatif. Kondisi ini menjadi indikator kuat bahwa secara struktural dan kebijakan, Wotawati memiliki dukungan eksternal yang memadai untuk melanjutkan proses transformasi secara berkelanjutan.

Tantangan dan Hambatan

Transformasi Dusun Wotawati menuju desa wisata berbasis *Community-Based Tourism (CBT)* tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan sosial. Berdasarkan keterangan Bapak Dukuh dan Ketua Pokja, saat ini Wotawati masih berada pada tahap pembangunan infrastruktur dasar dan penataan wilayah destinasi. Tahap ini merupakan fase konsolidasi fisik dan spasial, di mana pengembangan sarana pendukung wisata seperti akses jalan, titik atraksi, dan fasilitas publik masih dalam proses penyempurnaan. Dalam perspektif siklus hidup destinasi (*destination life cycle*), kondisi tersebut menunjukkan bahwa Wotawati berada pada tahap pengembangan awal (*development stage*), yang umumnya ditandai dengan kebutuhan investasi infrastruktur dan penguatan tata ruang destinasi.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang secara spesifik berperan sebagai pelaku wisata. Meskipun telah terdapat individu yang tersertifikasi sebagai pemandu wisata, jumlah pelaku yang aktif dan memiliki kompetensi teknis di bidang pemanduan, pengelolaan atraksi, dan manajemen wisata masih terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada kapasitas pelayanan dan kemampuan destinasi dalam menerima kunjungan dalam skala lebih besar. Secara teoritis, kekurangan SDM terlatih dapat memperlambat proses institusionalisasi pariwisata berbasis masyarakat karena beban pengelolaan cenderung terpusat pada kelompok tertentu.

Hambatan lain yang signifikan adalah belum diterapkannya sistem retribusi masuk destinasi. Ketiadaan retribusi menyebabkan belum optimalnya sumber pendapatan tetap (*fixed revenue stream*) yang dapat digunakan untuk operasional, pemeliharaan fasilitas, dan pengembangan destinasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem monetisasi wisata masih dalam tahap perintisan. Dalam pengelolaan desa wisata berbasis CBT, mekanisme retribusi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen keberlanjutan finansial sekaligus bentuk regulasi kunjungan.

Dari sisi infrastruktur fisik, akses jalan menuju Dusun Wotawati masih tergolong terbatas dan belum sepenuhnya memadai untuk mendukung mobilitas wisatawan dalam jumlah besar. Keterbatasan aksesibilitas ini berpotensi menghambat peningkatan kunjungan dan distribusi manfaat ekonomi. Infrastruktur transportasi merupakan elemen vital dalam sistem destinasi wisata, karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, keamanan, dan daya saing wilayah. Tanpa akses yang memadai, potensi daya tarik wisata tidak dapat dioptimalkan secara maksimal.

Selain hambatan teknis, tantangan sosial juga menjadi faktor penting. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai konsep dan pengelolaan pariwisata masih relatif terbatas, sehingga kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengelola wilayah belum merata. Partisipasi masyarakat juga belum sepenuhnya optimal, terutama di wilayah pinggiran dusun yang belum tersentuh secara menyeluruh oleh pembangunan awal. Pembangunan yang dimulai dari area tengah dusun menimbulkan persepsi ketimpangan spasial, sehingga sebagian warga di wilayah tepi merasa belum mendapatkan manfaat langsung. Kondisi ini mempengaruhi tingkat keterbukaan dan dukungan masyarakat terhadap program desa wisata.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Wotawati mencakup dimensi infrastruktur, kapasitas SDM, sistem pendapatan, serta dinamika partisipasi sosial. Hambatan tersebut merupakan karakteristik umum pada tahap awal pengembangan desa wisata berbasis CBT. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah, percepatan penyediaan infrastruktur, serta sosialisasi intensif untuk meningkatkan kesadaran kolektif. Dengan pendekatan partisipatif dan distribusi manfaat yang lebih inklusif, hambatan-hambatan tersebut dapat dikelola sebagai bagian dari proses pembelajaran menuju destinasi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat Dusun Wotawati dalam bertransformasi menuju desa wisata berbasis *Community-Based Tourism (CBT)* mengalami

kemajuan yang cukup signifikan, meskipun masih berada pada tahap penguatan. Secara kelembagaan, telah terbentuk kelompok kerja yang memiliki dasar regulasi internal (AD/ART) serta menjalin sinergi dengan BUMKAL dalam pengelolaan pendapatan. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan perguruan tinggi dan dinas pariwisata, sehingga fondasi institusional terbentuk secara partisipatif dan sistematis. Dari sisi sumber daya manusia, kesiapan tercermin dari adanya perangkat desa yang telah bersertifikasi pemandu wisata serta keterlibatan masyarakat dalam pelatihan kependidikan, pengelolaan homestay, pelayanan wisata, dan pengembangan UMKM, yang menandai tumbuhnya kompetensi teknis dan manajerial sebagai embrio SDM profesional penggerak desa wisata.

Pada aspek ekonomi, dampak pengembangan mulai dirasakan sejak 2023 melalui peningkatan kunjungan dan pembangunan infrastruktur, dengan sumber pendapatan awal berasal dari parkir dan homestay yang dikelola secara kolektif melalui BUMKAL dan kas pokja. Mekanisme ini mencerminkan prinsip tata kelola yang transparan dan berkeadilan, meskipun belum diterapkannya retribusi masuk serta keterbatasan akses infrastruktur masih menjadi kendala optimalisasi manfaat ekonomi. Secara umum, Wotawati berada pada fase awal pengembangan yang ditandai oleh konsolidasi partisipasi masyarakat, pembangunan sarana, dan penguatan kapasitas. Tantangan berupa keterbatasan SDM, literasi pariwisata yang belum merata, dan aksesibilitas wilayah pinggiran menjadi dinamika transisi yang perlu diatasi melalui dukungan kebijakan dan pembiayaan berbasis APBD, BKK, Dana Keistimewaan, serta perencanaan partisipatif agar pengembangan desa wisata berjalan inklusif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Pucung, khususnya Bapak Dukuh Dusun Wotawati, Bapak Carik/Sekretaris Desa Pucung, serta Ketua dan anggota Pokja Desa Wisata Wotawati yang telah memberikan izin, informasi, dan keterbukaan data selama proses penelitian berlangsung. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat Dusun Wotawati, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana secara optimal.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan Desa Wisata Wotawati, baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun penyusunan masterplan. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkaya data dan analisis dalam penelitian ini.

Terakhir, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa, dukungan, serta semangat yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pembangunan desa wisata berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Maulani, Ammela., Fakhruddin.,(2025) *Partisipasi Masyarakat pada Community Based Tourism di Desa wisata Giyanti*. Kabupaten Wonosobo
- Andjanie, I. F., Asyifa, N., Pratama, R. K., & Furqan, A. (2025). *Strengthening community involvement: An in-depth exploration of the community-based tourism (CBT) approach in Lamajang Tourism Village*. Bandung Regency.
- Chatkaewnapanon S. Youth involvement in sustainable tourism: Lessons from rural communities. *Asian J Tour Res*. 2018;5(3):77–88.
- Fifiyanti D, Taufiq ML, Ermawati KC. Penerapan konsep *community based tourism* dalam pengembangan desa wisata Burai. *Jurnal Industri Pariwisata*. 2023;5(2):1425–36. doi:10.36441/pariwisata.v5i2.1425
- Giampiccoli A, Kalis JH. Community-based tourism in rural areas: Enhancing Sustainability. *Journal Sustain Tour*. 2018;26(2):123–140.

- Khusnawati MA, Wahyudi A. Penerapan konsep community based tourism dalam pengelolaan desa wisata sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat. *Tourism Scientific Journal*. 2022;9(1):303–15. doi:10.32659/tsj.v9i1.303
- Okazaki E. A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal Sustain Tour*. 2008;16(5):511–529.
- Pimid. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Lokal*. 2024;8(2):101–116.
- Pratiwi EN, Utama MC, Romadhan MI. Komunikasi strategis berbasis *community based tourism* oleh BUMDes dalam pengembangan branding desa wisata. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*. 2025;5(4):2248–60. doi:10.69957/relasi.v5i04.2248
- Wardani S, Pimid. Kesiapan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. *Jurnal Pariwisata Nusantara*. 2024;9(1):33–45.
- Andriani, D., & Prasetyo, A. (2021). Pengembangan desa wisata berbasis community-based tourism dalam meningkatkan ekonomi lokal. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 15(2), 101–115.
- Dwijosusilo, K., & Shafiyah, S. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 143–156. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v4i2.3068>
- Sari, I. W., & Pinasti, V. I. S. (2023). Strategi Pokdarwis dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata (Studi Kasus Desa Wisata Giyanti, Wonosobo). *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 11(2), 84–95. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v11i2.59271>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Pedoman pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat*. Kemenparekraf RI.
- Lestari, P., & Nugroho, S. (2023). Model tata kelola desa wisata berbasis partisipatif. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(2), 210–223.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2021). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Mulyana, A., & Wibowo, E. (2022). Peran BUMDes dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 55–70.
- Septiani, A. N. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai desa wisata (Studi di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). *Publika*. 7(7), 32–25. <https://doi.org/10.26740/publika.v7n7.p%25p>
- Syafiqah, K. K., Aprilia, D., & Maharani, F. (2022). Implementasi konsep community-based tourism (CBT) dalam mendukung pengelolaan pariwisata berkelanjutan pada destinasi wisata Sanghyang Kenit di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pencinta Alam dan Lingkungan*, 1(2), 1–18.
- Sugiyono. (2023). *Metode kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 5th ed.). Bandung: Alfabeta.